BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian atas Penelitian Terdahulu

Kajian atas penelitian terdahulu pertama ini berfokus pada bentuk legitimasi dan delegitimasi dalam wacana politik. Berbagai penelitian ini menelaah bagaimana aktor dalam institusi politik dapat menggunakan strategi wacana untuk membenarkan maupun melemahkan kekuasaan, kebijakan, dan tindakan tertentu melalui strategi otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, maupun mitopoesis (narasi).

Dalam penelitiannya, Idrus & Nor (2016) menemukan bahwa dalam melakukan putusan hukum di pengadilan, hakim membangun legitimasi melalui strategi otorisasi yang merujuk pada kewenangan institusional dan keahlian hukum. Selain itu, hakim di pengadilan juga melakukan legitimasi evaluasi moral yang direalisasikan melalui nilai normatif. Sedangkan strategi rasionalisasi ditekankan dalam narasi tujuan dan alasan logis pada keputusan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Simonsen (2019) menunjukkan bahwa dalam diplomasi publik Israel, tindakan perang dibangun melalui legitimasi evaluasi moral dalam kategori abstraksi. Legitimasi tersebut dibingkai melalui narasi perang sebagai tindakan dalam nilai defensif. Selain itu, legitimasi juga dilakukan dalam strategi rasionalisasi yang ditandai oleh penggunaan alasan logis keamanan. Dalam wacana legitimasi, Asst & Abdulameer (2024) juga mengungkap bahwa Donald Trump melakukan tindak legitimasi kebijakan melalui strategi otoritas institusional dan otoritas personal sebagai

presiden. Sedangkan, strategi evaluasi moral dilakukan dengan menilai kebijakan Trump sendiri sebagai evaluasi yang benar, dan aktor lain diposisikan sebagai ancaman. Sementara itu, dalam penelitian Monetti (2024) ditemukan bahwa rezim militer Brasil menggunakan strategi evaluasi moral dengan evaluasi positif melalui wacana nasionalis dan pro-rakyat. Hal tersebut ditujukan untuk melegitimasi kekuasaan dan memperoleh penerimaan publik atas berbagai kebijakan yang diambil. Terakhir, dalam penelitiannya, Kunwara (2025) menegaskan bahwa legitimasi dan delegitimasi dalam ruang publik diproduksi melalui batas antara *kami* dan *mereka*. Legitimasi dibangun melalui narasi inklusivitas dalam bentuk otoritas kelompok dan strategi evaluasi moral positif. Sedangkan delegitimasi dibangun melalui strategi evaluasi moral negatif dan narasi ancaman.

Kelima penelitian di atas menunjukkan bahwa aktor dalam kelompok yang berkuasa seperti hakim, Kementerian Luar Negeri Israel, pimpinan negara seperti Donald Trump (Presiden U.S), rezim militer Brasil, maupun *vernacular publics* dalam media, menggunakan strategi legitimasi maupun delegitimasi yang digagas oleh van Leeuwen (2007) untuk memberikan pembenaran atas suatu kebijakan, serta melemahkan keabsahan dalam suatu kebijakan. Kelima penelitian tersebut relevan terhadap penelitian ini, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Hal ini dilatarbelakangi oleh persamaan fokus penelitian dalam wacana legitimasi dan delegitimasi. Namun, kelima penelitian tersebut berhenti pada klasifikasi strategi legitimasi dan delegitimasi yang digunakan, tanpa melakukan analisis teks secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis teks

secara detail untuk mengkategorisasikan bentuk strategi legitimasi dan delegitimasi, serta menganalisis konteks sosial yang mempengaruhi, maupun faktor yang melatarbelakangi wacana legitimasi dan delegitimasi pada konflik pagar laut Tangerang.

Kemudian, kajian atas penelitian terdahulu kedua dalam penelitian ini memiliki fokus pada analisis faktor sosio-kultural yang dapat ditinjau melalui konteks sosial yang mempengaruhi praktik wacana legitimasi dan delegitimasi untuk mempertahankan maupun melemahkan kebijakan, dalam konflik kekuasaan.

Dalam penelitian Kondratyeva (2021) ditemukan bahwa legitimasi kekuasaan *tsar* Rusia dalam surat-surat Ivan Grozny dipengaruhi oleh konteks strategi otoritas absolut. Strategi otoritas absolut tersebut dilakukan dengan membingkai kekuasaan Ivan IV sebagai utusan Tuhan, sehingga melalui otoritas Ivan IV, bentuk penolakan masyarakat diposisikan sebagai pelanggaran moral. Sementara itu, penelitian Berry (2023) menunjukkan bahwa wacana legitimasi yang dilakukan oleh kelompok milisi *Oath Keepers* (organisasi anti pemerintahan Amerika Serikat) dipengaruhi oleh konteks sosial dalam label ekstremisme (pandangan kepercayaan negatif kelompok yang dianggap radikal). Oleh karena itu, legitimasi tersebut dilakukan dengan merepresentasikan diri sebagai kelompok patriotik, dan upaya penghapusan representasi kekerasan melalui strategi evaluasi moral positif. Terakhir, dalam penelitian Nartey & Ngula (2025) ditemukan bahwa delegitimasi dalam wacana aktivisme pada *#FixTheCountry* di Ghana dipengaruhi oleh konteks penentangan kredibilitas pemerintah dalam strategi evaluasi moral negatif dan penyangkalan

rasionalisasi, yakni dengan membingkai negara sebagai aktor yang tidak kompeten dan tidak bermoral.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut mengungkap bahwa wacana legitimasi dan delegitimasi aktor politik seperti pimpinan *tsar* di Rusia, organisasi anti pemerintahan Amerika Serikat (*Oath Keepers*), dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik dalam struktur kekuasaan untuk memperoleh penerimaan publik maupun untuk membangun penolakan terhadap kebijakan tertentu. Strategi legitimasi dan delegitimasi digunakan sebagai alat kebahasaan untuk mempertahankan, menegaskan, maupun menentang kekuasaan dalam konflik politik dan relasi kuasa. Berbagai penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini khususnya dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait konteks sosial yang mempengaruhi wacana legitimasi dan delegitimasi dalam wacana politik. Namun, ketiga penelitian tersebut terbatas pada analisis konteks sosial yang melatarbelakangi kepentingan aktor dalam praktik legitimasi maupun delegitimasi, tanpa adanya analisis teks secara mendalam dan eksplorasi relasi antara praktik wacana dan praktik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan, yakni dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (1995) untuk menganalisis isi teks secara mendalam, mengidentifikasi strategi legitimasi dan delegitimasi yang digunakan melalui teori van Leeuwen (2007), serta menjelaskan latar belakang terjadinya praktik legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut Tangerang.

Kajian atas penelitian terdahulu ketiga di bawah ini berfokus pada relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam praktik legitimasi dan delegimasi wacana politik.

Dalam penelitian Rossi (2023) ditemukan bahwa delegitimasi kebijakan amnesti yang terjadi di Italia terjadi ketika wacana hukum dan rasionalisasi institusional negara bertolak belakang dengan pengalaman korban, memori kolektif, dan tuntutan keadilan publik, sehingga memicu delegitimasi di ruang publik. Sementara itu, dalam penelitian Melnik & Mityakina (2024) ditemukan bahwa wacana legitimasi dan delegitimasi muncul sebagai respons terhadap krisis kepercayaan dan ketidakstabilan relasi kuasa. Dalam praktik tersebut, legitimasi diposisikan sebagai strategi wacana yang berfungsi untuk membingkai kekuasaan melalui narasi kebijakan yang rasional.

Dalam kedua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa legitimasi dan delegitimasi dalam wacana politik tidak dapat dipisahkan dari relasi dialektis antara praksis wacana dan praksis sosial yang melingkupinya. Penelitian Rossi (2023) dan Melnik & Mityakina (2024) menunjukkan bahwa wacana delegitimasi diproduksi sebagai respons terhadap konflik kekuasaan, krisis kepercayaan, serta tekanan sosial. Sebaliknya, wacana legitimasi berfungsi sebagai strategi wacana yang digunakan untuk menstabilkan kembali tatanan sosial politik. Kedua penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini khususnya dalam menjawab pertanyaan penelitian ketiga terkait latar belakang terjadinya praktik legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut Tangerang. Namun, kedua penelitian tersebut terbatas pada analisis hubungan wacana dan konteks sosial tanpa melakukan kategorisasi bentuk legitimasi maupun delegitimasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menerapkan integrasi teori Fairclough (1995, 2013) dan van Leeuwen (2007)

untuk menganalisis realisasi bentuk legitimasi maupun delegitimasi dalam teks secara detail, sehingga dapat menjelaskan relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam konflik privatisasi pagar laut.

2.2 Kerangka Teoretis

2.1.1 Analisis Wacana Kritis

Merujuk pada pendapat Fairclough (1995, 2003), Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berhubungan erat dengan relasi kekuasaan dan ideologi. AWK bertujuan menganalisis hubungan antara teks, praksis wacana, dan praksis sosial untuk mengungkap bagaimana wacana berperan dalam menjalankan, mempertahankan, maupun menantang relasi kuasa yang menormalisasi praktik sosial tertentu, termasuk wacana legitimasi dan delegitimasi yang membenarkan, maupun menantang relasi kuasa dalam praksis sosial.

Fairclough (dalam Wodak & Meyer, 2002) memaparkan bahwa kajian dalam menganalisis data pada Kajian Analisis Wacana Kritis, pendekatan dilakukan dengan memahami tiga dimensi utama. Dimensi tersebut meliputi berikut ini.

(1) Deskripsi Teks

Deskripsi teks tidak hanya mencakup kajian bahasa, melainkan menguraikan bahasa sebagai praksis sosial yang membangun legitimasi, mempertahankan kekuasaan, maupun menentang kekuasaan (Fairclough, 2003). Merujuk pada pendapat

Fairclough (1995), deskripsi teks mencakup analisis gramatika, pilihan leksikal, struktur wacana, dan unsur kebahasaan lainnya.

(2) Interpretasi Proses Berwacana

Tahap interpretasi proses berwacana menghubungkan teks dengan konteks sosial. Tahap analisis pada interpretasi proses berwacana mencakup pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana untuk memahami bagaimana dan mengapa aktor atau penutur memproduksi wacana legitimasi atau delegitimasi (Fairclough, 2003). Interpretasi dalam proses berwacana dilakukan dengan menghubungkan ciri kebahasaan teks dengan konteks, ideologi, dan relasi kuasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fairclough (1995, 2003) bahwa dimensi praksis wacana berfungsi untuk menjelaskan alasan pembenaran maupun penolakan terhadap praktik sosial. Adapun faktor sosio-kultural dapat ditinjau melalui kategorisasi konteks sosial berikut ini.

a. Konteks Intitusional
b. Konteks Situasional
c. Konteks Historis

(3) Eksplanasi Relasi Praksis Wacana dan Praksis Sosial

Dalam pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK), Fairclough (1992, 1993) mendeskripsikan bahwa praktik sosial menjadi kerangka struktural bagi produksi, distribusi, dan konsumsi wacana. Praktik sosial merupakan bentuk konkret dari hubungan dialektis antara struktur sosial dan peristiwa diskursif.

Wacana memiliki peran dalam membangun dan mempertahankan legitimasi sosial, yaitu proses untuk membenarkan tatanan sosial, kebijakan, norma, atau relasi kekuasaan tertenu. Dalam upaya legitimasi, wacana ditujukan untuk menciptakan dan menstabilkan struktur sosial yang dianggap sah dan dapat diterima publik (Fairclough, 2003). Di sisi lain, melalui upaya delegitimasi, wacana juga dapat digunakan untuk melemahkan struktur sosial.

2.2.2 Bahasa dalam Sistem Kapitalisme (*Language in New Capitalism*)

Fairclough (2002) mengatakan bahwa sistem kapitalisme bersifat ekonomi yang didasarkan pada pengetahuan (*knowledge-based economy*), sehingga bahasa dapat menjadi alat dalam produksi, distribusi dan konsumsi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Bahasa bertujuam untuk membentuk identitas, mengarahkan praktik sosial, serta mempertahankan hegemoni dan relasi kuasa dalam masyarakat.

Merujuk pada Fairclough (2002) yang menekankan ciri dari perspektif *new capitalism* adalah praktik ekonomi dan politik yang didominasi oleh nilai-nilai kemampuan (fleksibilitas), adaptasi, dan keuntungan jangka pendek. Dalam konteks wacana, Fairclough (2002) kembali menjelaskan bahwa cara pandang *new capitalism* dalam wacana berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi perubahan tatanan sosial dan ekonomi dengan menekankan rasionalitas dan melemahkan dampak negatif terhadap kebijakan.

2.2.3 Legitimasi dan Delegitimasi dalam Wacana

(1) Legitimasi dalam Wacana

Legitimasi dalam wacana merupakan proses di mana suatu bentuk kekuasaan, kebijakan, atau tindakan dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Fairclough (2003) yang memaparkan bahwa legitimasi erat kaitannya dengan praktik hegemoni, yakni kekuasaan diterima bukan karena paksaan, tetapi karena telah dibingkai sebagai sesuatu yang sah dan netral secara sosial. Dalam konteks ini, wacana digunakan untuk membentuk struktur dominasi yang dapat diterima publik. Upaya pembenaran untuk dapat diterima publik tersebut dapat dilakukan melalui strategi legitimasi yang dikonstruksi oleh bahasa. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh peran wacana yang dapat disalahgunakan untuk mengontrol perspektif masyarakat terhadap realitas sosial.

Fairclough (2003) menekankan bahwa upaya legitimasi merupakan representasi dari praksis sosial dalam praktik tertentu sebagai sesuatu yang dianggap *benar* dan *dibenarkan*. Klasifikasi strategi legitimasi dikembangkan oleh van Leeuwen (dalam Fairclough, 2003) sebagai berikut.

a. Strategi legitimasi melalui otorisasi

Strategi otorisasi dilakukan dengan merujuk pada otoritas personal, otoritas ekspert, otoritas peran *role model*, ataupun otoritas impersonal (van Leeuwen, 2007). Strategi otorisasi dalam upaya legitimasi berfungsi untuk membentuk persepsi bahwa

tindakan tersebut dibenarkan oleh kekuasaan atau tradisi, sehingga kebenaran yang disampaikan tidak perlu dipertanyakan.

a. Strategi legitimasi melalui evaluasi moral

van Leeuwen (2007) memaparkan bahwa bentuk legitimasi melalui evaluasi moral didasarkan pada nilai-nilai moral atau norma sosial yang berlaku secara kolektif. Adanya strategi evaluasi moral berfungsi untuk mengaitkan tindakan dengan standar etika atau nilai dengan tujuan dianggap benar secara moral berdasarkan abstraksi/evaluasi/analogi.

b. Strategi legitimasi melalui rasionalisasi

Tindakan rasionalisasi dijelaskan oleh van Leeuwen (2007) merupakan upaya legitimasi melalui penalaran logis, teknis, ataupun tujuan praktis. Legitimasi ini memiliki tujuan untuk membangun citra dalam menentukan kebijakan atau tindakan sebagai tindakan yang masuk akal, perlu, dan efisien, sehingga bebas dari kepentingan ideologis. Adapun klasifikasi legitimasi melalui rasionalisasi ini meliputi bentuk instrumental, dan teoretikal.

c. Strategi legitimasi melalui mitos dan narasi

Upaya legitimasi mitos dan narasi dibangun melalui narasi atau cerita (baik fiksi maupun pengalaman nyata) yang menyampaikan pesan moral atau membentuk identitas kolektif (van Leeuwen, 2007). Dengan demikian strategi legitimasi yang dibangun melalui mitos ataupun narasi ini ditujukan untuk menginspirasi atau membangun ancaman melalui cerita, untuk membentuk logika atau *peringatan*.

Dalam Analisis Wacana Kritis, legitimasi dipandang sebagai strategi wacana yang dapat digunakan baik untuk menjalankan kekuasaan secara sah maupun untuk mengaburkan penyalahgunaan kekuasaan. Merujuk pada pendapat Fairclough (2003), legitimasi dapat digunakan sebagai alat relasi hegemoni, yang bermakna kekuasaan dijalankan melalui produksi konsensus diskursif yang menormalisasi relasi kuasa atau dominasi tertentu. Dalam kerangka tersebut, praktik legitimasi dapat bersifat problematis ketika digunakan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Sejalan dengan pendapat Simpson, dkk. (2021) yang menekankan bahwa legitimasi bersifat tidak netral dan beroperasi secara bias, karena legitimasi membentuk penilaian pihak lain terhadap keabsahan suatu tindakan, sehingga berkaitan dengan relasi kuasa dan posisi aktor.

Atas berbagai klasifikasi pada strategi legitimasi tersebut, Fairclough (2003) menegaskan bahwa dalam wacana, legitimasi berfungsi untuk membingkai tindakan, kebijakan, atau bentuk kekuasaan tertentu sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan atau kebijakan tertentu dapat diterima tanpa penolakan terbuka karena dibentuk dengan rasional dan diarahkan pada tujuan kolektif. Bahasa yang digunakan dalam wacana legitimasi dikonstruksi dalam bentuk netral atau objektif untuk menyamarkan kepentingan ideologis. Adanya representasi yang tampak netral sering kali menyembunyikan posisi kekuasaan dan kepentingan kelompok dominan (Fairclough 1995). Dengan demikian, legitimasi dalam wacana bertujuan untuk membentuk penerimaan terhadap kekuasaan melalui penggunaan bahasa yang disampaikan secara netral.

(2) Delegitimasi dalam Wacana

Delegitimasi merupakan proses diskursif yang menyangkal atau melemahkan keabsahan praktik sosial atau kebijakan tertentu (van Leeuwen, 2007). Upaya delegitimasi dilakukan melalui pembalikan atau penyangkalan strategi legitimasi seperti otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, atau mitopoesis. Untuk mengklasifikasikan dalam bentuk delegitimasi, Chilton (2004) mengatakan bahwa indikasi delegitimasi dapat ditinjau secara eksplisit maupun implisit melalui narasi *blaming* (menyalahkan), *accusing* (menuduh), penggunaan leksikon evaluatif negatif, maupun penegasan pelanggaran hukum. Atas adanya indikasi tersebut, selanjutnya delegitimasi dapat dikategorisasikan berdasarkan pendapat van Leeuwen (1953) melalui beberapa strategi berikut.

a. Otoritas penyangkalan (*counter-autorization*)

Otoritas yang dijadikan dasar pembenaran baik berupa negara, institusi, maupun tokoh tertentu direpresentasikan sebagai pihak yang tidak berwenang, tidak kompeten, atau tidak memiliki legitimasi yang memadai (van Leeuwen & Wodak, 1999).

b. Evaluasi moral negatif (*negative moral evalution*)

van Leeuwen & Wodak (1999) mendefinisikan evaluasi moral negatif sebagai pembingkaian tindakan atau kebijakan melalui penilaian yang bertentangan dengan nilai, norma, atau prinsip sosial yang diakui, seperti keadilan, kepentingan publik, dan kesejahteraan kolektif.

c. Rasionalisasi penyangkalan (*counter rationalization*)

Gugatan pada strategi rasionalisasi menurut pendapat van Leeuwen & Wodak (1999) adalah merujuk pada penonjolan ketidaksesuaian antara klaim rasional meliputi alasan, tujuan, atau manfaat praktis yang digunakan untuk membenarkan suatu tindakan dengan dampak sosial yang dihasilkan. Strategi ini membingkai tindakan menjadi tidak logis, tidak efektif, atau tidak berorientasi pada kepentingan yang dinyatakan.

d. Narasi negatif (*negative mythophoesis*)

Strategi narasi negatif dipaparkan oleh van Leeuwen & Wodak (1999) dengan merujuk pada narasi pembingkaian ulang praktik sosial sebagai ancaman, penyimpangan, atau pelanggaran.

Fairclough (2003) mengungkapkan bahwa untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, memperkuat, atau menantang legitimasi dalam berbagai konteks sosial dan politik dapat melalui eksplanasi analisis teks. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis teks ialah teori *Systemic Functional Linguistics (SFL)* dari Halliday & Matthiessen, (2014) yang dapat mengeksplor analisis fungsi bahasa dalam membentuk makna ideologis dan relasi kekuasaan di dalam wacana legitimasi. Halliday & Matthiessen, (2014) mengatakan bahwa pendekatan SFL berfokus pada fungsi interpersonal, fungsi ideasional, maupun fungsi tekstual. Pada praktik legitimasi, fungsi ideasional ini digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, membentuk, atau menyembunyikan realitas sosial dan ideologis. Merujuk pada Halliday & Matthiessen (2014), fungsi

ideasional dianalisis melalui sistem transitivitas, yang terdiri dari komponen berikut ini.

a. Kategori proses (material, mental, verbal, relasional, behavioral, eksistensial)

b. Partisipan/fungsi (siapa yang melakukan atau mengalami):

(i) proses material: Aktor (pelaku), Gol (sasaran) untuk proses material transitif

(ii) proses mental: Senser (yang merasakan), Fenomena (yang dirasakan). Adapun kategori fenomena ialah, afektif (emosi/perasaan), kognitif (pikiran/pengetahuan), perspektif (indra/persepsi), desiratif (harapan).

(iii) proses Relasional: Carrier (yang membawa atribut), Attribute (menyatakan sifat, identitas)/identifier (menyatakan sesuatu identik dengan yang lain) + (intensif/adalah)/(kepemilikan/posesif)/(fungsional);

(iv) proses Verbal: Sayer (yang bicara), Receiver (penerima informasi atau ucapan)/Verbiage (isi ucapan);

(v) proses Behavioral: Behaver (yang berperilaku);

(vi) proses Eksistensial: Existent (yang ada);

c. Sirkumstansial (kapan, di mana, manner).

Di samping itu, untuk menganalisis penilaian, keyakinan, dan sikap yang dapat mempengaruhi penerimaan ide dalam strategi legitimasi dapat dilakukan dengan analisis fungsi interpersonal berdasarkan kerangka Halliday & Matthiessen (2014) yang meliputi berikut ini.

a. Penggunaan Pronomina

Halliday & Matthiessen (2014: 30) menjelaskan bahwa metafungsi interpersonal membentuk hubungan sosial melalui struktur pronomina persona yang menunjukkan posisi penutur, kepada siapa tuturan ditujukan, serta menunjukkan jarak hubungan pada partisipan. Analisis polarisasi penggunaan pronomina dapat digunakan sebagai strategi legitimasi, dengan membentuk identitas sosial.

b. Modalitas

Halliday & Matthiessen (2014) menjelaskan bahwa modalitas merupakan ekspresi linguistik yang merepresentasikan ketidakpastian di antara bentuk iya (afirmasi) dan tidak (negasi). Pada upaya legitimasi modalitas yang digunakan untuk mengungkap tingkat keyakinan, keharusan, komitmen penutur.

Halliday & Matthiessen (2014) membedakan modalitas ke dalam tingkatan (*high*, *median*, *low*) untuk menunjukkan derajat kepastian atau keharusan yang menunjukkan sudut pandang penutur sebagai berikut.

(i) Modalitas epistemik (*probability*) meliputi level tinggi yang ditandai *dengan pasti, jelas, tentu, bisa.* Level median yang ditandai dengan *mungkin, agaknya, barangkali.* Serta level rendah yang ditandai dengan *bisa jadi, siapa tahu.*

(ii) Modalitas deontik (*obligation*) meliputi level tinggi yang ditandai dengan *harus, wajib.* Level median yang ditandai dengan *sebaiknya, seharusnya.* Serta level rendah yang ditandai dengan *boleh, diizinkan.*

(iii) Modalitas intensional (inclination) meliputi level tinggi yang ditandai dengan rela, sungguh ingin. Level median yang ditandai dengan ingin, mau, bersedia, akan. Serta level rendah yang ditandai dengan enggan, malas.

Dalam merepresentasikan ketegasan klaim, Lakoff (1973) juga memaparkan mengenai *hedging* yang berfungsi sebagai alat yang digunakan aktor dominan untuk mengurangi kepastian klaim. Adapun hedging ditandai oleh bentuk leksikal, *we can't* (tidak bisa), *so far* (sejauh ini), *maybe* (mungkin), serta berbagai bentuk penyangkalan seperti *I don't know* (saya tidak tahu) yang berfungsi untuk menghindari resistensi atau penolakan.

Selain itu, analisis legitimasi juga dapat menggunakan identifikasi *booster* dalam kerangka Hyland (2005). *Booster* merupakan bagian dari metadiscourse interpersonal yang digunakan untuk menegaskan kepastian dan komitmen penulis atau penutur terhadap suatu proposisi. Booster ditandai dengan unsur leksikal, *in fact* (faktanya), *definitely* (pasti), *it is clear that* (jelas bahwa), *clearly* (jelas), *obviously* (niscaya), *undoubtedly* (tidak diragukan lagi), *always* (selalu), *totally* (sepenuhnya), *certainly* (tetap).